

Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility Social Responsibility

Tata Kelola Kolaboratif Dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Corporate Social Responsibility

Safira Hanny Rizky Wasiat ^{1a(*)} Roy Valiant Salomo^{2b}

¹²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Jakarta

^a sofiewasiat@gmail.com

(*) Corresponding Author
sofiewasiat@gmail.com

How to Cite: Wasiat, S. H. R. & Salomo, R. V. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui *Corporate Social Responsibility*. *Santhet*, 8(1), x-x. doi: 10.36526/js.v3i2.3948

Received: 18-04-2024
Revised : 11-04-2024
Accepted: 30-06-2024

Keywords:
Governance,
Corporate Social
Responsibility,
Stunting

Abstract

This research aims to explore collaborative governance in accelerating the reduction of stunting through Corporate Social Responsibility (CSR) programs in Warakas Village, North Jakarta. The Ketapang Kuning program, a CSR initiative, successfully reduced the stunting rate from 19.3% to 12% in 2022. This study employs a qualitative approach with data collection techniques that include field studies and literature reviews. The results indicate that collaboration between the private sector, government, and community is crucial in addressing stunting issues. Key factors supporting the success of this program include power-resource-knowledge asymmetries such as knowledge, managerial capabilities, and financial resources from the business sector, as well as incentives to participate in the form of internal and external motivations like rewards, and collective facilitative leadership and transparency. The discussion of this research emphasizes the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) in reducing stunting and how effective collaboration between various parties can produce significant impacts. The collaboration between the government and the private sector, as demonstrated by PT. PLN IP Priok PGU, serves as a concrete example of how human resources and available funds can be optimally utilized to achieve common goals in stunting reduction..

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dengan pertanda panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yaitu di bawah minus dua dari standar deviasi (-2SD) (Kemenkes, 2021). Kondisi ini secara permanen dapat membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak sehingga menyebabkan kerusakan yang seumur hidup (UNICEF, 2014).

Terdapat penurunan prevalensi stunting selama dekade terakhir, dimana menurut UNICEF, WHO, dan World Bank (2023) angka prevalensi pada Tahun 2022 adalah 22,3% dari 148 juta anak dibawah lima tahun di dunia dan sebagian besar diantaranya tinggal di Asia (52% dari pangsa global). Sedangkan di Indonesia (Survey Status Gizi Indonesia, 2022) angka prevalensi stunting masih berada di angka 21,6% dan jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 14% pada Tahun 2024 menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa stunting bersifat irreversible atau tidak bisa dipulihkan (World Health Organization (WHO), 2015). Tata Kelola Kolaboratif pada upaya percepatan penurunan stunting menjadi penting karena harus melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan dan aktor-aktor lain, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada BAB V Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Koordinasi Penyelenggara Tingkat Pusat, Daerah Kabupaten/Kota, sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan.

Namun sangat disayangkan, setelah delapan tahun ditetapkan menjadi Program Prioritas Nasional, walaupun tren setiap tahunnya menunjukkan namun prevalensi stunting saat ini masih tergolong tinggi karena lebih dari 20%. Bahkan beberapa provinsi di Indonesia masih menunjukkan angka prevalensi diatas 30%, diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%, Sulawesi Barat sebesar 35%, Papua sebesar 34,6%, Nusa Tenggara Barat sebesar 32,7%, Aceh sebesar 31,2% dan Papua Barat sebesar 30%. Hal ini tentu masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 14% pada Tahun 2024. Berikut adalah diagram Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) di Setiap Provinsi.

Tata Kelola Kolaboratif pada tahap implementasi kebijakan sama pentingnya dengan pada tahap formulasi, dimana penerapan Tata Kelola Kolaboratif sebagian besar terdapat pada Collaborative Action (Emerson et al., 2012). Tentu saja dengan banyaknya pemangku kepentingan dan aktor yang terlibat maka koordinasi dan komunikasi menjadi salah satu tantangan tersendiri mengingat bahwa adanya perbedaan visi dan prioritas pada setiap pemangku kepentingan, kompleksitas struktur pemerintahan, komunikasi yang tidak efektif, kurangnya akses pada informasi dan data yang tersedia (Hadi, 2023). Pada saat dilakukan implementasi, hal mengenai siapa yang harus menanggung biaya dan meraih manfaat pun sering muncul sebagai salah satu bentuk konflik (Sørensen & Torfing, 2021). Sehingga, sampai dengan penelitian ini dilakukan, angka stunting nasional di Indonesia masih jauh di atas target 14% sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi oleh pemangku kepentingan terkait secara menyeluruh seperti terkait tata kelola kolaboratif antar instansi dan atau pemangku kepentingan, implementasi program, pembiayaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Di tengah upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting, di RW 8 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berhasil menurunkan angka stunting dari 19,3% pada Tahun 2021 menjadi 12% pada Tahun 2022. Jakarta Utara sendiri menempati ranking kedua dengan prevalensi balita tertinggi yaitu 18,5% di Provinsi DKI Jakarta setelah Kabupaten Kepulauan Seribu pada Tahun 2022 menurut SSGI. Dalam melihat keberhasilan signifikan tersebut, hal yang membedakan dari wilayah lainnya adalah adanya keterlibatan peran PT. PLN Indonesia Power Priok PGU melalui program *Corporate Social Responsibility* yaitu Ketahanan Pangan Keluarga Usir Stunting atau biasa disebut Ketapang Kuning pada Tahun 2022. PT. PLN Indonesia Power Priok PGU adalah salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PLN (Persero) dimana kegiatan utamanya adalah sebagai penyedia tenaga listrik dengan mengelola pembangkit listrik sehingga tentu dalam melaksanakan Program Ketapang Kuning, perusahaan tersebut juga melibatkan aktor lain seperti Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Pemerintah Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Masyarakat, dan lain-lain.

Oleh karenanya, penting untuk diketahui bagaimana implementasi dari Tata Kelola Kolaboratif dalam terlaksananya program tersebut sehingga dapat diraih keberhasilan penurunan angka stunting dan tidak ada penambahan anak stunting baru sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan atau akademisi yang akan melakukan penelitian pada waktu yang akan datang. Dampak stunting tidak hanya bersifat kesehatan, melainkan juga ekonomi, dengan memperpanjang siklus kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2012, The World Health Organization menetapkan target penurunan prevalensi stunting anak di bawah lima tahun sebesar 40% pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan selama dekade terakhir, angka prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, mencapai 21,5% pada tahun 2023 (SKI, 2003).

Upaya pemerintah dalam menangani stunting tergambar melalui berbagai kebijakan, perundang-undangan, dan berbagai program intervensi baik sensitif maupun spesifik. Penurunan percepatan stunting menjadi salah satu Program Prioritas Nasional sejak ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai dengan saat ini, hingga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan ditetapkan target prevalensi sebesar

14% pada Tahun 2024. Namun sangat disayangkan, setelah delapan tahun ditetapkan menjadi Program Prioritas Nasional, walaupun tren setiap tahunnya menunjukkan namun pravelensi stunting saat ini masih tergolong tinggi karena lebih dari 20%. Bahkan beberapa provinsi di Indonesia masih menunjukkan angka pravelensi diatas 30%, diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%, Sulawesi Barat sebesar 35%, Papua sebesar 34,6%, Nusa Tenggara Barat sebesar 32,7%, Aceh sebesar 31,2% dan Papua Barat sebesar 30%. Hal ini tentu masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 14% pada Tahun 2024.

Upaya percepatan penurunan stunting melibatkan banyak pemangku kepentingan dan aktor (Desreza et al., 2022) sehingga koordinasi dan komunikasi menjadi salah satu tantangan besar, mengingat adanya perbedaan visi dan prioritas pada setiap pemangku kepentingan, kompleksitas struktur pemerintahan. Sehingga dalam hal ini strategi Tata Kelola Kolaboratif sebagaimana yang diungkapkan oleh Ansell & Gash (2008) menjadi penting. Badan Usaha baik milik negara maupun swasta dapat turun berperan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan berkolaborasi secara aktif dalam upaya penanganan stunting. Melalui Tata Kelola Kolaboratif, diharapkan beberapa aktor termasuk Pemerintah dan Badan Usaha dapat berkerjasama untuk berkumpul, berkembang melaksanakan, dan memberikan solusi jangka panjang untuk tantangan yang luas (Zadek, 2006).

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kota administrasi dengan pravelensi tertinggi kedua setelah Kepulauan Seribu. RW 8 dengan jumlah anak stunting tertinggi di Kelurahan Warakas dipilih menjadi lokus dari Program CSR Ketapang Kuning yang diinisiasi oleh PT. PLN Indonesia Power Priok PGU untuk turut membantu pemerintah menurunkan angka stunting dan berhasil menurunkan angka stunting dari 19,3% pada Tahun 2021 menjadi 12% pada Tahun 2023, serta tidak ada penambahan baru kasus stunting sampai dengan penelitian ini dilakukan. PT. PLN Indonesia Power Priok PGU yang bergerak pada pengelolaan pembangkit listrik pun berkerjasama dengan aktor-aktor lain dalam melakukan Program Ketapang Kuning menggunakan pendekatan Collaborative Governance berhasil menurunkan pravelensi stunting secara signifikan, sehingga menjadi menarik untuk diteliti. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah jawaban dari solusi terhadap masih tingginya angka pravelensi stunting di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaboratif yang terjadi dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara menurut Ansell & Gash (2008). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam CSR untuk percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi masalah stunting melalui CSR, serta faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan kolaborasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Peneliti menjadi instrumen kunci, dan analisis data bersifat induktif, lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan mengonfirmasi data melalui triangulasi. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti Badan Statistik dan media cetak. Analisis data dilakukan secara induktif selama dan setelah pengumpulan data, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tata Kelola Kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting melalui Corporate Social Responsibility pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara

Pengembangan masyarakat memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sumber daya kehidupan mereka secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perkembangan dan pilihan hidup mereka, serta mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan komunitas mereka. Program pengembangan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi yang ada di sekitar mereka. Sebagai negara yang menganut prinsip kesejahteraan yang beragam, penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Sektor swasta berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Saat ini, kegiatan CSR banyak diintegrasikan sejak awal dalam bisnis perusahaan, di mana produksi perusahaan mengutamakan keseimbangan antara keuntungan, lingkungan, dan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah meningkat dalam signifikansi, menjadi pusat perdebatan, komentar, dan penelitian yang substansial, mengalami perubahan pendekatan dan perkembangan baru, baik dalam teori maupun praktik, dengan pengembangan yang baru dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, terutama dalam lima puluh tahun terakhir (Farcane & Bureana, 2015). CSR merupakan esensi dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya fokus pada pemenuhan tanggung jawab ekonomis dan hukumnya terhadap para pemegang saham, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kelangsungan hidup, usaha, operasi, dan keuntungan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak (Erni, 2007).

GM PLN Indonesia Power Priok Power Generation Unit (PGU), Igan Subawa Putera, menyampaikan bahwa PLN IP Priok PGU memiliki visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terdepan dan berkelanjutan di Asia Tenggara. Misionya adalah menyediakan solusi energi yang andal, inovatif, ramah lingkungan, dan melampaui harapan pelanggan. Dengan kapasitas sebesar 2892 MW, PLN IP Priok PGU memainkan peran penting dalam kelistrikan di wilayah Jawa, Madura, Bali, serta Jakarta, terutama untuk subsistem Priok, Cawang, dan Bekasi, dengan kontribusi 65% pasokan listrik di area tersebut, termasuk melayani tempat-tempat VVIP di Jakarta. Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, PT. PLN Indonesia Power Priok PGU menjalankan program-program CSR yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program CSR mereka meliputi PAUD Inklusi, Program Rojali, Taman Hatinya Sunter, dan termasuk Program Ketahanan Pangan Usir Stunting atau Ketapang Kuning, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat bukan hanya mencari profit.

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan, PT. PLN Indonesia Power Priok PGU melaksanakan social mapping, stakeholder engagement, dan Life Cycle Assessment untuk menyusun program CSR yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi dampak di wilayah operasi. Contoh konkret dari inisiatif ini adalah program Ketapang Kuning, yang mendukung Perpres No. 72 Tahun 2021 untuk percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan di wilayah Warakas RW 08. Program ini berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 19,3% pada 2021 menjadi 12% pada 2022, serta menciptakan Komunitas Budidaya Ikan Lele dan Warung Opini "Optimalkan Gizi Sehatkan Generasi" yang mendukung akses penyediaan protein hewani dan inovasi lingkungan. Menurut Ansell & Gash (2008) proses Collaborative Governance dilakukan dalam beberapa tahap yaitu face to face dialogue, trust building, commitmen to process, shared understanding, dan intermediate outcomes.

Pada tahap face to face dialogue, selama berlangsungnya Program Ketapang Kuning dilakukan pertemuan rutin baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan

teknologi informasi seperti Zoom dan Whatsapp sehingga lebih dapat memudahkan para pemangku kepentingan yang terbatas oleh waktu dan jarak. Pertemuan diadakan secara berkala untuk membahas monitoring dan evaluasi minimal dua minggu sekali dan juga secara insidental untuk membahas permasalahan yang ditemukan dilapangan agar dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti. Pada tahap trust building, kepercayaan antar para pemangku kepentingan dibangun sejak tahap awal Program Ketapang Kuning yang dimulai secara parsial antara PT. PLN Indonesia Power Priok PGU dengan para pemangku kepentingan di kesempatan yang berbeda baik dengan pendekatan informal maupun formal.

Setelah kepercayaan tersebut berhasil dibangun, PT. PLN Indonesia Power Priok mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan untuk merajut kepercayaan di antara para pemangku kepentingan tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi diadakan secara rutin dan ketat untuk menjaga rasa kepercayaan antara para pemangku kepentingan tersebut. Pada tahap commitment to process, para pemangku kepentingan dalam Program Ketapang Kuning memiliki kesadaran akan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan kolaborasi yaitu menurunkan angka stunting, dimana para pemangku kepentingan menyadari bahwa sumber daya, pengetahuan, dan kapabilitasnya masing-masing tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya kolaborasi. Komitmen dan keseriusan para pemangku kepentingan ini dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman yang dibuat pada tahap awal Program Ketapang Kuning. Pada tahap shared understanding, tujuan utama dari kolaborasi yaitu penurunan angka stunting dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan tersebut pun juga telah memiliki pemahaman yang sama mengenai stunting serta dampak-dampaknya apabila tidak ditangani dengan baik, termasuk memahami mengenai visi dan misi jangka panjang dari Program Ketapang Kuning ini yaitu menjadikan RW 08 Kelurahan Warakas sebagai resource center dan juga best practice agar dapat direplikasi di wilayah lain dalam skala yang lebih luas. Pada tahap intermediate outcomes, terdapat small wins yang dapat meningkatkan partisipasi dalam kolaborasi diantaranya adalah terbentuknya kebiasaan konsumsi protein hewani yang baik, adanya tata laksana stunting sebagai pedoman tenaga kesehatan di lapangan, serta realisasi program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan PT. PLN Indonesia Power PGU dalam mencapai tujuan utama kolaborasi.

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang dilakukan oleh PLN IP Priok PGU, merupakan contoh nyata dalam penurunan angka stunting. Program Ketapang Kuning yang dimulai pada 2021 telah menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut, dan diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi di daerah lain. Proses tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, mencerminkan integrasi yang erat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan sebuah langkah strategis yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui CSR, perusahaan mengambil peran aktif dalam mendukung inisiatif pemerintah untuk menangani stunting, sebuah masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik.

Kolaborasi ini membuka pintu bagi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, menciptakan efek sinergis yang dapat mempercepat upaya penurunan stunting. Di samping itu, tata kelola yang baik dalam proses ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat, sehingga memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan Program Ketapang Kuning dapat menjadi contoh bagi upaya serupa di tempat lain, serta memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi percepatan penurunan stunting dalam Corporate Social Responsibility pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara

Menurut Ansell & Gash (2008) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi, yaitu adalah Power Resource Knowledge Asymmetries, Incentive to Participate, Prehistory of Antagonism and Cooperation, Facilitative Leadership, Participatory Inclusiveness, Clear Ground Rules, and Transparency Process.

a. Power Resource Knowledge Asymmetries

Ketidakseimbangan sumber daya memiliki implikasi terhadap insentif kelompok untuk turut berpartisipasi dalam proses kolaboratif (Day et al., 2003; Imperial, 2005). Para pemangku kepentingan di RW 08 Kelurahan Warakas pada dasarnya memiliki sumber daya dan kapabilitas masing-masing namun belum terintegrasi dengan baik. PT. PLN Indonesia Power Priok PGU hadir sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam tata kelola kolaborasi yang menawarkan kemampuan manajerial mumpuni, menyediakan sumber daya finansial yang tidak dimiliki oleh pemangku kepentingan lainnya, serta menghadirkan pemangku kepentingan lain yaitu ahli atau akademisi untuk menyusun tata laksana stunting yang dapat dijadikan sebagai pedoman intervensi spesifik pada Program Ketapang Kuning.

b. Incentive to Participate

Terdapat dorongan internal dan eksternal yang memotivasi para pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam kolaborasi Program Ketapang Kuning. Dorongan internal tersebut berupa motivasi pribadi dan komitmen mendalam yang dimiliki aktor, sedangkan dorongan eksternal berupa pengakuan atau penghargaan yang turut berperan penting dalam meningkatkan motivasi aktor, dalam konteks ini PT. PLN Indonesia Power Priok PGU telah menerima dua kali penghargaan terkait Program Ketapang Kuning yaitu Proper Emas dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards Tahun 2022-2023. Dalam hal ini, insentif akan meningkat apabila para pemangku kepentingan melihat adanya hubungan langsung antara kepartisipasian mereka dengan hasil kebijakan yang nyata, konkrit, dan efektif (Brown, 2002) Belum adanya tata laksana stunting yang resmi disusun oleh Pemerintah pada saat program dilaksanakan, juga dapat dinilai sebagai bentuk dari kebuntuan kebijakan yang menciptakan dorongan besar bagi sebuah proses Collaborative Governance (Futrell, 2003).

c. Prehistory of Antagonism and Cooperation

Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash (2008) seringkali dibangun di atas sejarah dendam atau konflik yang menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan stereotip namun di sisi lain menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan tinggi sehingga tercipta siklus kolaborasi yang baik. Tidak ada konflik masa lalu yang terjadi di antara para pemangku kepentingan. Sebaliknya, terdapat sejarah kerjasama yang baik antara PT. PLN Indonesia Power Priok PGU dengan pemangku kepentingan Walikota Jakarta Utara yang justru menunjukkan sebuah hubungan saling percaya dan adanya kolaborasi yang efektif.

d. Facilitative Leadership

Tidak ada dominasi peran kepemimpinan dalam Program Ketapang Kuning ini. Justru kepemimpinan dalam program ini bersifat kolektif dimana para pemangku kepentingan memiliki peran dalam menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan kapasitas, pengetahuan, dan sumber dayanya masing-masing dan berhasil mendorong partisipasi, memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif, dan memastikan adanya pengaruh dan kontrol luas sesuai kebutuhan sebagaimana disampaikan oleh Lasker (2001).

e. Institutional Design

Institutional Design yang merujuk pada inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, peraturan dasar yang jelas, dan transparansi proses (Ansell & Gash, 2008). dimana proses kolaborasi dalam Program CSR Ketapang Kuning didasari oleh dasar hukum dan peraturan yang jelas, yaitu Nota Kesepahaman PT. Indonesia Power Priok PGU dengan Kelurahan Warakas tentang Program Ketahanan Pangan Keluarga Usir Stunting (Ketapang Kuning) No. 004.MoU/060/PROPOMU/2021 Periode 2021 – 2026 dan Keputusan Lurah Warakas No. 327

Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Ketahanan Pangan Usir Stunting (Ketapang Kuning) Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing aktor kolaborasi. Transparansi juga sangat terjaga dalam proses ini melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berkala.

O'leary dan Bingham dalam Allen & Gillespie (2001) menyebutkan bahwa kolaborasi merupakan sebuah konsep mengenai proses yang fasilitasi dan pelaksanaan dengan melibatkan multi organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang sukar untuk dipecahkan oleh suatu organisasi secara sendirian. Oleh karenanya menurut Sudarmo (2015) kolaborasi diartikan sebagai bentuk kegiatan dua institusi atau lebih yang bekerjasama sehingga lebih dapat meningkatkan public value dibanding bekerja masing-masing.

Ansel dan Gash (2007) mendefinisikan Tata Kelola Kolaboratif atau Collaborative Governance sebagai bentuk kerjasama di antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang berbeda, dengan fokus pada pembentukan keputusan kolektif dan implementasi kebijakan yang dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan efektif terhadap masalah-masalah kompleks. Dalam konteks ini, kolaborasi dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Hal ini senada dengan (Donahue & Zeckhauser, 2011) yang menunjukkan bahwa tata kelola kolaborasi merujuk pada situasi dimana Pemerintah berkolaborasi dengan organisasi atau individu untuk mencapai sebuah tujuan publik. Kolaborasi pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang terletak pada pengelolaan jaringan sosial yang merupakan simpul komunikasi antara para pemangku kepentingan.

Ansel dan Gash (2008) menegaskan bahwa dalam proses tata kelola kolaborasi melibatkan pemangku kepentingan "*non-state*" di dalam proses formulasi kebijakan secara formal dengan berorientasikan konsensus dan deliberative untuk mencapai tujuan membuat atau mengimplementasikan sebuah kebijakan publik dan atau mengatur asset atau program publik. Tata kelola kolaboratif merupakan kondisi di saat Pemerintah dan swasta bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat (Holzer & Schwester, 2019). Berikut adalah tabel yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi percepatan penurunan stunting dalam *Corporate Social Responsibility* pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara:

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting Dalam *Corporate Social Responsibility* pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas

No.	Faktor	Deskripsi
1	<i>Power Resource Knowledge Asymmetries</i>	Ketidakseimbangan sumber daya dan dimiliki oleh para pemangku kepentingan. PT. Indonesia Power Priok PGU berkontribusi pada kemampuan manajerial dan sumber daya finansial.
2	<i>Incentive to Participate</i>	Adanya dorongan internal berupa motivasi pribadi dan komitmen mendalam masing-masing aktor dan dorongan eksternal berupa penghargaan yang meningkatkan tingkat partisipasi dalam kolaborasi.
3	<i>Prehistory of Antagonism and Cooperation</i>	Tidak ada konflik di masa lalu yang terjadi antara para pemangku kepentingan. Sebaliknya, terdapat sejarah kerjasama yang baik antara PT. PLN Indonesia Power Priok PGU dengan Kantor Walikota Jakarta Utara yang menunjukkan adanya kolaborasi yang efektif.
4	<i>Facilitative Leadership</i>	Kepemimpinan dilakukan secara kolektif berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya, pengetahuan, dan kapabilitas

masing-masing pemangku kepentingan. Adanya Nota Kesepemahaman, dan Surat Keputusan Lurah Warakas yang mendasari terbentuknya Tim Pelaksana Program Ketapang Kuning

KESIMPULAN

Proses Tata Kelola Kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, melibatkan integrasi yang erat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. Dalam program ini, perusahaan seperti PT. PLN Indonesia Power PGU berperan aktif mendukung inisiatif pemerintah untuk menangani stunting, dengan hasil yang signifikan seperti penurunan angka stunting dari 19,3% pada tahun 2021 menjadi 12% pada tahun 2022, serta tidak ada penambahan angka stunting baru pada saat penelitian ini dilakukan. Kolaborasi ini membuka pintu bagi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, menciptakan efek sinergis yang mempercepat upaya penurunan stunting. Tata kelola yang baik dalam proses ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat, sehingga memastikan program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Percepatan penurunan stunting melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. keberhasilan program ini meliputi *power-resource-knowledge* assymetris berupa pengetahuan, kemampuan manajerial, dan finansial dari sektor dunia usaha, serta *incentive to participate* berupa dorongan internal dan eksternal seperti penghargaan, serta *facilitative leadership* yang kolektif dan transparansi.

Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin melalui Program Ketapang Kuning menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi aktif dunia usaha melalui CSR dalam kolaborasi dengan pemerintah, dan masyarakat dapat membawa perubahan nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting. Diharapkan, model Collaborative ini dapat dijadikan sebagai *best practice* terhadap implementasi program serupa di berbagai daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

REFERENCES

- Allen, L. H., & Gillespie, S. R. (2001). *What works? A review of the efficacy and effectiveness of nutrition interventions*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Brown, A. J. (2002). *Collaborative governance versus constitutional politics: Decision rules for sustainability from Australia's South East Queensland forest agreement*. *Environmental Science and Policy*, 5(1), 19–32. [https://doi.org/10.1016/S1462-9011\(02\)00022-9](https://doi.org/10.1016/S1462-9011(02)00022-9)
- Day, J. C., Gunton, T. I., & Williams, P. W. (2003). *Evaluating collaborative planning: The British Columbia experience*. *Environments*, 31(3).
- Desreza, N., Mulfianda, R., & Nurmalia. (2022). *Efforts To Prevent Stunting In Families With Toddlers Based On The Planned Behavior Theory Approach In Lampulo Village, Banda Aceh City*. *Pharmacology Medical Reports Orthopedic And Illness Details (COMORBID)*, 1(1). <https://doi.org/10.55047/comorbid.v1i1.822>
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Erni, R. E. (2007). *Business Ethics-Etika Bisnis*. CV. Alfabeta, Bandung.

- Farcane, N., & Bureana, E. (2015). History of "Corporate social responsibility" concept. *Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica*, 17(2), 31. <https://doi.org/10.29302/OECONOMICA.2015.17.2.3>
- Futrell, R. (2003). Technical Adversarialism and Participatory Collaboration in the U.S. Chemical Weapons Disposal Program. *Science Technology and Human Values*, 28(4), 451–482. <https://doi.org/10.1177/0162243903252762>
- Hadi, N. I. (2023). Challenges and Opportunities of Collaborative Governance in Addressing Stunting: Lessons from Papua. *KnE Social Sciences*, 857–866. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183>
- Holzer, M., & Schwester, R. W. (2019). Public administration: An introduction. In *Public Administration: An Introduction*. <https://doi.org/10.4324/9780429507878>
- Imperial, M. T. (2005). Collaboration and performance management in network settings: Lessons from three watershed governance efforts.
- Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage. *The Milbank Quarterly*, 79(2), 179–205. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.00203>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Radical and disruptive answers to downstream problems in collaborative governance? *Public Management Review*, 23(11), 1590–1611. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1879914>
- Zadek, S. (2006). *The logic of collaborative governance*. Harvard Kennedy School of Government Working Paper, 14.